

Judul : Bukan Sekedar Bangun Infrastruktur
Tanggal : Sabtu, 12 Maret 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : A3

Bukan Sekedar Bangun Infrastruktur

Tri SUBARKAH

subarkah@mediaindonesia.com

SEJAK Desember 2021, pemerintah mengubah paradigma dari pendekatan militeristik ke arah humanis yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Namun, peristiwa penembakan delapan pekerja di proyek PT Palaparing Timur Telematika (PTT) oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) pada Rabu (2/3), di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, mengindikasikan belum maksimalnya perubahan pendekatan yang dilakukan pemerintah di Bumi Cenderawasih.

Peneliti Pusat Penelitian Kewilayahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Cahyo Pamungkas menilai perubahan pendekatan itu hanya sekedar narasi. Dalam praktiknya, pemerintah disebut tetap melakukan pendekatan keamanan negara.

Operasi Damai Cartenz, misalnya, memiliki substansi yang tidak berbeda jauh dengan operasi sebelumnya yang dinamai Namengkawi.

"Intinya menggunakan kepolisian untuk memonitor, memantau, atau mengendalikan kelompok-kelompok masyarakat yang ingin merdeka," ujarnya saat dihubungi *Media Indonesia*, Rabu (9/3).

Sejalan dengan itu, TNI juga tetap mengirim pasukan ke Papua dan memperbanyak komando-komando teritorial dengan mendirikan koramil, kodam, dan korem. Menurut Cahyo, cara-cara seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah di Papua. Ia menilai orang asli Papua (OAP) memiliki trauma psikologis dengan kehadiran aparat keamanan.

Mengutuk

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem Muhammad Farhan menyebut penembakan KKB terhadap delapan pekerja PTT sebagai serangan brutal dan kejam.

Seraya mengutuk serangan tersebut, Farhan meminta pemerintah untuk meningkatkan pendekatan keamanan ke level operasi aktif terkait masalah KKB.

"Langkahnya, kesatuan organik melakukan pencarian keberadaan KKB tersebut," ujar Farhan.

Kendati demikian, ia menjelaskan satuan yang diterjunkan pada operasi aktif itu bukan bersifat organik teritorial Papua. Artinya, satuan tersebut harus terdiri atas kesatuan khusus seperti Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.

"Operasi keamanan ini bukan operasi militer, jadi tindakannya terukur dan selektif," jelas Farhan.

Disamping itu, Farhan juga mengingatkan agar pendekatan sosial, ekonomi, dan teknologi tetap harus dilanjutkan secara bersamaan. Ia berpendapat, pembangunan

infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil Papua terbukti membuka cakrawala informasi dan pengetahuan.

Seperti diketahui, delapan pekerja yang tewas ditembak KKB saat kejadian sedang memperbaiki fasilitas menara *base transceiver station* (BTS) untuk jaringan telekomunikasi 4G. Menurut anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta, serangan tersebut menegaskan sikap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang menghalangi pembangunan di Papua.

Senada dengan Farhan, Sukamta juga meminta pemerintah segera mengambil langkah tegas dan terukur. Ini bisa dilakukan dengan mengusut secara tuntas peristiwa tersebut sampai ke pengadilan. Ia juga mendorong pemerintah agar memperbaiki prosedur pengamanan dalam rangka melindungi masyarakat sipil dari berbagai ancaman kekerasan TPNPB-OPM.

"Lakukan kajian secara mendalam dinamika sosial politik keamanan yang terjadi di Papua sehingga langkah-langkah antisipasi bisa dilakukan sejak awal," jelasnya.

Meski telah berupaya mempercepat pembangunan di Papua, Sukamta berharap pemerintah lebih serius untuk mengatasi persoalan di Papua. Ia berpendapat, hal paling mendasar dalam pembangunan di Papua ialah dengan memanusiakan orang Papua itu sendiri.

Oleh karena itu, Sukamta menyebutkan upaya percepatan pembangunan harus berjalan beriringan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Papua. "Juga hentikan eksploitasi dan pengerukan kekayaan alam Papua karena ini akan selalu menghadirkan isu ketidakadilan bagi warga Papua," tandasnya.

Berbeda dengan rekomendasi dua rekannya di Senayan, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKB Marthen Douw justru meminta pemerintah membangun dialog dalam rangka meredam konflik Papua. Menurutnya, dialog akan berhasil menyentuh akar persoalan.

"Dalam dialog, akan kita temukan akar-akar persoalan hingga solusi akan didapati," katanya singkat kepada *Media Indonesia*.

Dorongan untuk mengadakan dialog selama ini juga kerap dikuman-

dangkan oleh Cahyo. Ia menyebut, dialog yang inklusif mampu menyelesaikan permasalahan jangka panjang. Pasalnya, pendekatan militer yang sebelumnya diterapkan pemerintah dinilai malah semakin memperbesar konflik.

Kebutuhan dasar

Cahyo juga menyoalkan pembangunan infrastruktur di Papua. Meski menginsyafi pentingnya pembangunan, ia berpendapat tidak semua infrastruktur bisa dimanfaatkan oleh OAP. Dalam hal ini, Cahyo lebih menekankan pembangunan yang berakar pada komunitas.

"Misalnya kehadiran guru, perawat, obat-obatan. Enggak bisa hanya infrastruktur," paparnya.

Mengamini pernyataan Cahyo, akademisi Universitas Cenderawasih, Jayapura, Elvira Rumkabu juga enggan menafikan pembangunan yang dilakukan pemerintah di Papua. Namun, ia menekankan pembangunan harus memperhatikan akses, kontrol, manfaat, dan dampak untuk masyarakat.